

LAPORAN KINERJA 2024



Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan
Informasi dan Komunikasi Publik
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Komunikasi dan Digital
2024

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Catatan :

-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 - *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP) Tahun 2024. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024.

Pada tahun 2024 Puslitbang Aptika dan IKP telah menyelesaikan program kerja yang dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 diantaranya yaitu Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kominfo, Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital, Persentase (%) Pemprosesan Pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP, Persentase (%) Keberlangsungan Layanan Platform SDM Digital Nasional, Persentase (%) Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang Dijadikan Referensi Penetapan Program Pengembangan SDM Digital di Provinsi, Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024, Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Puslitbang APTIKA IKP pada Tahun 2024, Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Puslitbang APTIKA IKP pada Tahun 2024, Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024, dan Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024.

Pencapaian yang telah kami lakukan tidaklah terlepas dari kerja keras semua pihak dan seluruh satuan kerja di lingkungan Puslitbang Aptika dan IKP. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan dalam penyelesaian laporan kinerja ini. Kami berharap penyusunan laporan kinerja ini dapat menjadi bahan referensi bagi seluruh jajaran Puslitbang Aptika dan IKP dan dapat menciptakan sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat luas serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.

Jakarta, 24 Januari 2025

Dr. Said Mirza Pahlevi, M.Eng.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR TABEL

iii

BAB 1 Pendahuluan

01

A. Latar Belakang

01

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

01

C. Struktur Organisasi Puslitbang Aptika dan IKP

02

Bab 2 Perencanaan Kinerja

03

A. Perencanaan Kinerja

03

Bab 3 AKUNTABILITAS KINERJA

05

A. Capaian Kinerja

05

B. Analisis Capaian Kinerja

06

C. Capaian Kinerja Lainnya

11

D. Realisasi Anggaran

13

Bab 4 Penutup

15

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024	03
Tabel 2. Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024	05
Tabel 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Informatika dan Informasi Komunikasi Publik tahun 2024	12
Tabel 4. Realisasi Anggaran Puslitbang Aptika dan IKP Tahun 2024 per komponen	13
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Anggaran Puslitbang Aptika dan IKP Tahun 2023 dan 2024	14

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB 1 Pendahuluan

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan di dunia teknologi, Sumber Daya Manusia juga harus terus mengalami peningkatan di bidang pengetahuan dan keterampilan. Dalam rangka peningkatan di bidang pengembangan aplikasi informatika dan informasi komunikasi publik, dan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebagai turunan dari kinerja Badan Pengembangan SDM Kominfo, maka Puslitbang Aptika dan IKP memiliki beberapa program kerja yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam mencapai sasaran kinerja serta rencana kerja yang terukur dan pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi setiap tahun. Pelaksanaan rencana kerja Puslitbang Aptika dan IKP harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN & RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini tidak hanya menjadi uraian capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024, tetapi juga menjadi cerminan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Kominfo. Di samping itu, Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Puslitbang Aptika dan IKP menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Puslitbang Aptika dan IKP, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja di tahun selanjutnya.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Kominfo pasal 668, Puslitbang APTIKA dan IKP merupakan salah satu satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengembangan SDM.

2. Tugas

Tugas Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP) yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.

3. Fungsi

Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP) yaitu:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjamin mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.

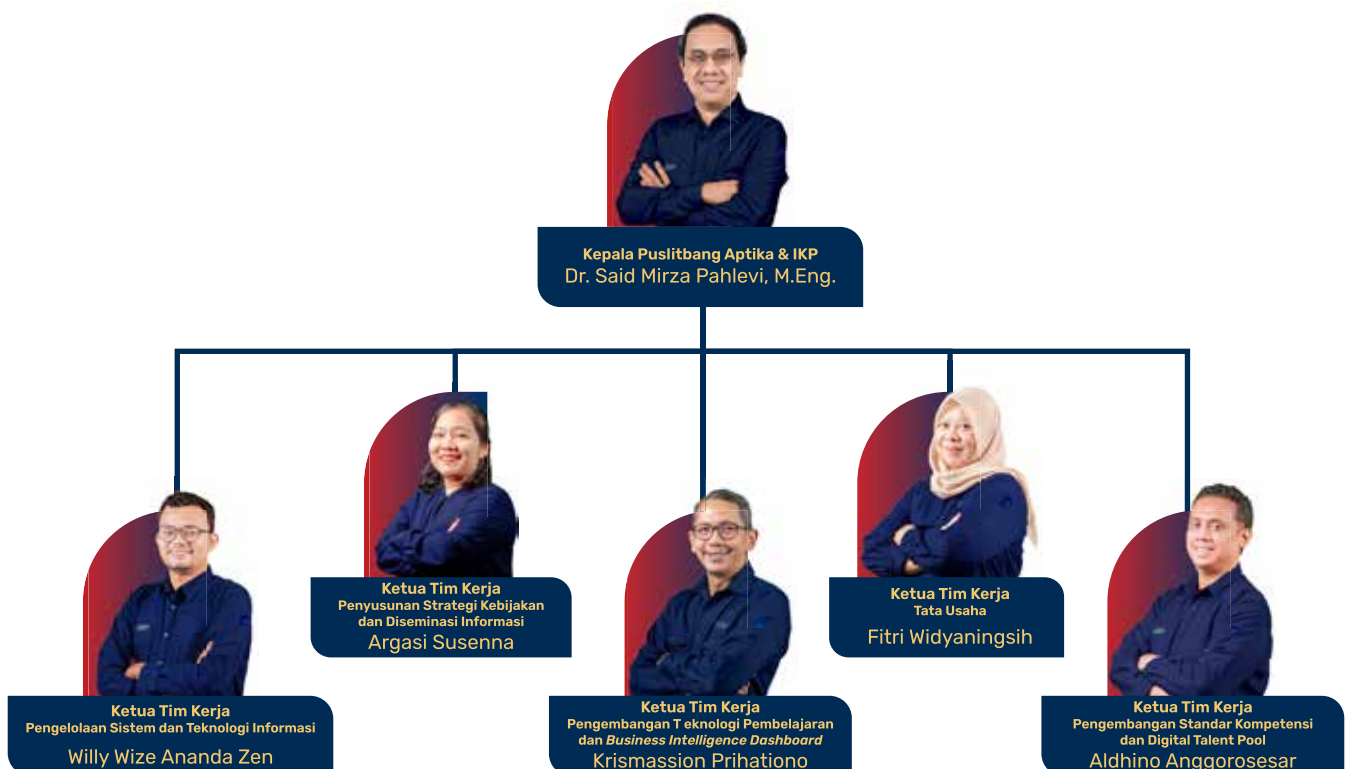
2. Penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.
4. Pelaksanaan administrasi pusat.

C. Struktur Organisasi Puslitbang Aptika dan IKP

Jumlah pegawai di lingkungan Puslitbang Aptika dan IKP sebanyak 45 orang yang terdiri dari 20 orang PNS, 5 orang pegawai PPNPN, 15 orang tenaga pendukung, dan 5 orang tenaga ahli. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Puslitbang Aptika dan IKP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Aplikasi Informatika Dan Informasi Dan Komunikasi Publik, Puslitbang Aptika dan IKP dibagi ke dalam 5 Tim Kerja antara lain:

- a. Tim Kerja Pengembangan Standar Kompetensi dan Digital Talent Pool
- b. Tim Kerja Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi
- c. Tim Kerja Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Business Intelligence Dashboard
- d. Tim Kerja Penyusunan Strategi Kebijakan dan Diseminasi Informasi
- e. Tim Kerja Tata Usaha

Bagan Organisasi Puslitbang Aptika dan IKP



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik dituangkan dalam sebuah perjanjian kinerja yang merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja dan dipertanggungjawabkan hasilnya kepada unit kerja Eselon I sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Kominfo. Tujuan adanya perjanjian kinerja yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sebagai wujud nyata antara penerima amanah dan pemberi amanah, selain itu perjanjian kinerja juga dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Kinerja.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024

Sasaran Kinerja 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target
Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kominfo	5 Rancangan Standar
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital	1 Rekomendasi Kebijakan
Persentase (%) Pemrosesan Pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP	100%
Persentase (%) Keberlangsungan Layanan Platform SDM Digital Nasional	90%
Persentase (%) Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang Dijadikan Referensi Penetapan Program Pengembangan SDM Digital di Provinsi	15%

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Sasaran Kinerja 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Puslitbang Aptika dan IKP yang Bersih dan Efisien

Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target
Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024	1%
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Puslitbang APTIKA IKP pada Tahun 2024	70%
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Puslitbang APTIKA IKP pada Tahun 2024	30%
Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024	40%
Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP yang Dilakukan Secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30%

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah capaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024:

Tabel 2. Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik tahun 2024:

Sasaran Kinerja 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika			
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja bidang Kominfo	5 Rancangan Standar	5 Rancangan Standar	100%
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
Persentase (%) Pemrosesan Pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP	100%	100%	100%
Persentase (%) Keberlangsungan Layanan Platform SDM Digital Nasional	90%	99,25%	110,28%
Persentase (%) Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang Dijadikan Referensi Penetapan Program Pengembangan SDM Digital di Provinsi	15%	15%	100%

Sasaran Kinerja 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Puslitbang Aptika dan IKP yang Bersih dan Efisien			
Indikator Kinerja Sasaran Kinerja (IKSK)	Target	Capaian Kinerja	%
Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024	1%	1% (Tidak ada temuan)	100%
Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Puslitbang APTIKA IKP pada Tahun 2024	70%	70% (Tidak ada temuan)	100%

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya di Puslitbang APTIKA IKP pada Tahun 2024	30%	30% (Tidak ada temuan)	100%
Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024	40%	93,29%	233,23%
Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024	30%	36,24%	120,80%

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa dari 10 indikator kinerja yang terdapat di Puslitbang Aptika dan IKP sampai dengan bulan Desember 2024 telah tercapai dengan *progress* dari masing-masing indikator kinerja sedikitnya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Puslitbang Aptika dan IKP telah berjalan baik dan seluruh target dapat tercapai.

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja bidang Kominfo

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen (penilaian) keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan KKNi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Ditinjau dari sisi substansi, SKKNI umumnya masih bersifat curah, tanpa kemasan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)/Okupasi. Oleh karena itu, diperlukan peta okupasi untuk melengkapi SKKNI agar dalam penyusunan skema sertifikasi dapat mencakup *skills for employability* dan membuat sertifikasi menjadi *employable* sesuai dengan kebutuhan industri. Peta okupasi nasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah diluncurkan oleh MenKominfo pada tahun 2017, dalam proses penyusunannya melibatkan stakeholder (pemerintah, industri, akademisi, dan lembaga pelatihan) untuk memetakan jenis-jenis jabatan/okupasi/profesi, sub bidang maupun area fungsi pada sektor TIK.

Peta Okupasi bidang TIK berbentuk katalog yang mencantumkan deskripsi keahlian dan unit kompetensi di setiap okupasi/jabatan/profesi. Peta okupasi sebagai *living document* (dokumen hidup) membutuhkan pemutakhiran yang berkelanjutan agar dapat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan industri bidang TIK. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melakukan pemutakhiran peta okupasi bidang TIK sehingga dapat digunakan sebagai rujukan oleh *stakeholder* dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pelatihan, pengembangan skema sertifikasi, serta pengembangan karir dan pemagangan. Pada tahun 2024, Puslitbang Aptika dan IKP melakukan Pemutakhiran Peta Okupasi Bidang TIK.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Jumlah Draft Peta Okupasi Bidang TIK yang diperbaharui, Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Komunikasi dan Informatika yang diserahkan Kementerian Kominfo kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk disahkan, dan Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang Komunikasi dan Informatika yang siap disahkan.

Adapun 5 rancangan standar yang menjadi target kinerja Puslitbang Aptika dan IKP di tahun 2024 antara lain:

- a. SKKNI Manajemen Layanan TI
- b. SKKNI ICT Project Management
- c. Rancangan KKKNI Bidang Fotografi
- d. Rancangan KKKNI Bidang Audit TI
- e. PON bidang TIK

2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan pengembangan SDM Digital berdasarkan hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital

Pada tahun 2022, Badan Pengembangan SDM Kominfo telah melakukan pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai langkah konkrit Indonesia dalam menindaklanjuti inisiatif Indonesia dalam Presidensi G20 yaitu menyusun sebuah toolkit untuk mengukur *digital literacy* dan *digital skills*. Pengukuran IMDI diukur setiap tahun yang nantinya akan menjadi referensi dalam penyusunan Rekomendasi Kebijakan berbasis data. Pada tahun 2024, Badan Pengembangan SDM Kominfo kembali melakukan pengukuran IMDI di 514 Kota/Kabupaten di Indonesia yang telah diluncurkan pada tanggal 10 September 2024. IMDI diharapkan dapat menjadi salah satu indikator nasional dalam mendukung percepatan transformasi digital. Melalui pengukuran IMDI 2024, Kominfo dapat mengukur dan mengevaluasi implementasi rencana aksi yang telah disusun berdasarkan rekomendasi yang telah disusun. Hal ini dapat memberi gambaran dan masukan atas area-area perbaikan dan pengembangan yang diperlukan, khususnya bagi Badan Pengembangan SDM Kominfo, untuk mencapai kondisi ideal pemenuhan talenta digital dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang digitalisasi di Indonesia. Hasil pengukuran IMDI tahun 2024 yaitu sebesar 43,34 untuk level nasional. Skor ini menunjukkan adanya peningkatan dari hasil di tahun-tahun sebelumnya, yakni 37,80 di tahun 2022 dan 43,18 di tahun 2023.

Pada tahun 2024, Pilar keterampilan digital menjadi pilar dengan skor tertinggi, yaitu 58,25, sedangkan pilar pemberdayaan menjadi pilar dengan skor terendah, yaitu 25,66. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini masyarakat Indonesia sudah mampu menggunakan teknologi digital, namun masih belum optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia kemudian dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan yang dituangkan dalam Buku Indeks Masyarakat Digital Indonesia, sehingga nantinya dapat digunakan oleh para stakeholder dan masyarakat dalam program pengembangan SDM Digital di Indonesia.



3. Persentase (%) pemrosesan pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP

Pada tahun 2024, Puslitbang Aptika IKP memiliki tugas untuk melakukan pemrosesan pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan Persentase jumlah pengajuan Surat Rekomendasi/ Dukungan Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP yang telah diproses. Tahun 2024 Puslitbang Aptika dan IKP telah memproses 7 surat rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. LSP Digital Kreatif Solusi | e. LSP Teknologi Data Digital Indonesia |
| b. LSP Signal Informatika Teknindo | f. LSP Artificial Intelligence Indonesia |
| c. LSP PDP Indonesia | g. LSP Digital Kreatif Nusantara |
| d. LSP AINAKI | |

4. Persentase Keberlangsungan Layanan Sistem Informasi SDM Digital

Persentase Keberlangsungan Layanan Sistem Informasi SDM Digital merupakan persentase durasi ketersediaan layanan sistem informasi SDM digital untuk dapat diakses oleh pengguna melalui internet selama 24 jam *non-stop* dalam satu tahun.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan akumulasi up-time service layanan Platform SDM Digital (tidak termasuk *down-time* terkait insiden dan pemeliharaan server) dibagi total waktu layanan dalam 1 tahun (24 jam selama 366 hari).

Sepanjang tahun 2024 Puslitbang Aptika dan IKP telah berhasil melaksanakan layanan sistem informasi SDM Digital sebesar 99,25%. Adapun kegiatan lainnya yang dilakukan untuk mendorong tercapainya target yaitu pengembangan aplikasi Digital Nasional.

5. Persentase (%) Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dijadikan referensi penetapan program pengembangan SDM digital di Provinsi

IMDI adalah suatu basis pengukuran tingkat kompetensi digital masyarakat Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota. Indeks ini bertujuan menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan program pengembangan SDM Digital di Indonesia. Indikator ini menghitung pemanfaatan dari pengukuran IMDI yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. Pemanfaatan dilihat dari penggunaan IMDI sebagai salah satu referensi atau sumber data dalam penyusunan rencana kebijakan dan program pengembangan SDM digital di daerah.

Skema perhitungan diambil dari jumlah provinsi yang menjadikan IMDI sebagai referensi/sumber data dalam penyusunan rencana kebijakan dibandingkan dengan total provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2024 Puslitbang Aptika dan IKP telah menyelesaikan advokasi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) di enam provinsi, yaitu Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendorong penguatan kebijakan berbasis data untuk mendukung transformasi digital di berbagai daerah.

Pelaksanaan advokasi ini menghasilkan pernyataan terkait kesediaan pemanfaatan IMDI sebagai referensi dalam penyusunan program pengembangan SDM digital dari para pemerintah daerah di keenam provinsi tersebut. Komitmen ini menunjukkan kepercayaan dari pemerintah daerah terhadap IMDI sebagai alat strategis untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah. Dengan menjadikan IMDI sebagai rujukan kebijakan, diharapkan setiap provinsi dapat lebih cepat beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi dan mewujudkan masyarakat yang semakin cerdas digital.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai temuan pengembalian ke kas negara yang tercatat dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan BPSDM Kominfo TA 2023 dibandingkan dengan total realisasi anggaran BPSDM Kominfo TA 2023.

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024 menunjukkan bahwa tidak ada temuan di satuan kerja Puslitbang Aptika dan IKP. Sehingga, persentase capaian kinerja atas indikator Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Puslitbang Aptika IKP adalah nihil.

7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Puslitbang APTIKA IKP

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan merupakan Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK pada tahun 2024 (atas LHP yang keluar pada tahun 2024) yang selesai ditindaklanjuti.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK pada tahun 2024 (atas LHP BPK yang keluar pada tahun 2024) yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi BPK tahun 2024 (atas LHP yang keluar pada tahun 2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2024, tidak ada temuan di satuan kerja Puslitbang Aptika dan IKP yang harus ditindaklanjuti.

8. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya merupakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan BPK pada tahun sebelumnya (atas LHP yang keluar pada tahun ≤ 2023) yang selesai ditindaklanjuti.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan berdasarkan total tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya atas LHP BPK yang keluar pada tahun ≤ 2023 yang telah selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi BPK tahun ≤ 2023 (atas LHP yang keluar pada tahun 2023).

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2023 menunjukkan tidak ada temuan di satuan kerja Puslitbang Aptika dan IKP yang harus ditindaklanjuti.

9. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP Tahun 2024

Indikator ini melihat realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang dan Jasa di Puslitbang Aptika dan IKP yang dilakukan pada tahun 2024. Pengukuran yang dilakukan berdasarkan pada pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.

Sampai dengan Desember 2024, nilai Belanja Pengadaan Barang dan Jasa di Puslitbang Aptika dan IKP untuk Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM mencapai Rp 14.707.676.409 atau sebesar 93,29% dari nilai komitmen belanja yang sebelumnya disepakati sebesar Rp 15.765.919.000. Nilai ini juga tercantum dalam Nota Dinas Sekretaris Badan Litbang SDM Nomor 3070/BLSDM.1/UP.01.05/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Capaian Pelaksanaan PBJ, PDN, UMKM, dan e-Purchasing BPSDM Komdigi Desember 2024.

10. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024

Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang APTIKA dan IKP yang dilakukan secara Elektronik (E-Purchasing) Tahun 2024 merupakan realisasi belanja pengadaan Barang dan Jasa Puslitbang Aptika dan IKP yang dilakukan secara elektronik (E-Purchasing) di tahun 2024 yang diukur berdasarkan pembelian atau pencatatan melalui aplikasi SPSE.

Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perhitungan persentase belanja pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui aplikasi SPSE terhadap Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa. Pada tahun 2024 Pelaksanaan Belanja Melalui E-Purchasing Puslitbang Aptika dan IKP adalah RP 6.629.712.832 (36,24%). Nilai ini berdasarkan sumber data dari Nota Dinas Sekretaris Badan Litbang SDM perihal Capaian Pelaksanaan PBJ, PDN, UMKM & E-Purchasing BPSDM Komdigi Desember 2024.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2024, Puslitbang Aptika dan IKP juga berhasil mencapai output kinerja selain yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), antara lain:

1. Publikasi ilmiah di Jurnal Internasional

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Puslitbang Aptika dan IKP dalam mempublikasikan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah melalui publikasi ilmiah di jurnal internasional. Pada tahun 2024, Puslitbang Aptika dan IKP berhasil mempublikasikan artikel ilmiah dengan judul **“Framework for Monitoring the Spatiotemporal Distribution and Clustering of the Digital Society Index of Indonesia”** di salah jurnal yang dikelola oleh Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) dan telah terindeks Scopus.

Tujuan dari publikasi ilmiah ini adalah untuk memperluas publikasi IMDI, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para *stakeholder*, termasuk akademisi dan institusi pendidikan. Selain itu, publikasi ilmiah ini juga bertujuan untuk membuka ruang diskusi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ataupun penyempurnaan IMDI ke depannya.

2. Kajian Teknokratik Pembangunan Pusat Talenta Digital Nasional (DTC) di Indonesia

Dalam upaya mendukung program pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang digital, Puslitbang Aptika dan IKP menyusun Kajian Teknokratik Pembangunan Pusat Talenta Digital Nasional (DTC) di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan DTC. Beberapa rekomendasi kebijakan tersebut termasuk pembangunan secara bertahap, pemanfaatan teknologi digital, dan kemitraan lintas sektor. Dalam kajian ini juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mendukung pelaksanaan tugas DTC dalam menciptakan SDM di bidang digital.

3. Pengembangan Platform Ekosistem SDM Digital

Secara bertahap, Puslitbang Aptika dan IKP berupaya untuk mengembangkan Platform Ekosistem SDM Digital yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM digital di Indonesia. Pada tahun 2024, pengembangan platform yang dilakukan adalah dengan menyediakan informasi dan fitur yang berkaitan dengan standar pengembangan kompetensi SDM di bidang digital. Adapun informasi dan fitur yang tersedia dalam platform ini adalah terkait SKKNI, KKNi, Peta Okupasi, Skema Sertifikasi Nasional, serta Pendaftaran dan Permohonan Dukungan Lisensi LSP. Platform ini dapat digunakan oleh para *stakeholder* terkait seperti Kementerian/Lembaga, Asosiasi Profesi, Asosiasi Industri, Akademisi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta masyarakat umum (publik).

4. Penghargaan yang dicapai oleh Puslitbang Aptika dan IKP

Pada tahun 2024, Puslitbang Aptika dan IKP memperoleh beberapa penghargaan antara lain sebagai berikut:

- a. Festival Of Innovation Award 2024 yang diberikan oleh Govinsinder pada tanggal 26 Maret 2024
 - 1) The Digital Society Award – Aplikasi Digital Mobile
 - 2) The Rising Star Digital Star Award – Willy Wize
- b. Inovator BPSDM Kominfo, inovasi terbaru BPSDM kominfo yang akan diusulkan pada level Kementerian serta ajang Anugerah ASN 2025 :
 - 1) Tim Strategi Kebijakan dan Diseminasi Informasi: Advokasi Pemanfaatan Dashboard BID Provinsi
 - 2) Tim Teknologi Pembelajaran dan BID : Practitioner Studio For Programming
 - 3) Tim Sistem Teknologi Informasi : Aplikasi Digital Mobile
 - 4) Puslitbang Aptika dan IKP : Penyusun Modul Terbaik
 - 5) ASN Inspiratif BPSDM Kominfo : Willy Wize
- c. CIO/CDO of the year yang diberikan oleh International Data Corporation (IDC) di acara IDC Future Enterprise Award 2024
 - 1) Kepala Puslitbang Aptika dan IKP sebagai CIO/CDO Country Winner (Indonesia)
 - 2) Kepala Puslitbang Aptika dan IKP sebagai CIO/CDO Regional Winner (Asia Pacific)

Penghargaan yang telah dicapai oleh Puslitbang Aptika dan IKP di tahun 2024 menjadi gambaran keberhasilan dan prestasi Puslitbang Aptika dan IKP yang didukung oleh kinerja dari tim kerja serta pegawai di Puslitbang Aptika dan IKP.

D. Realisasi Anggaran

Berikut realisasi penyerapan anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Informatika dan Informasi Komunikasi Publik:

Tabel 3. Realisasi Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi dan Informatika dan Informasi Komunikasi Publik tahun 2024

Satuan Kerja	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran	
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Rupiah	%
Puslitbang Aptika dan IKP	20.059.311.000	20.088.978.000	19.911.876.489	99,12%

Adapun rincian realisasi anggaran per komponen tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran Puslitbang Aptika dan IKP Tahun 2024 per kegiatan

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital	Rp 5.629.472.000	Rp 5.571.925.958	99,98%
Koordinasi Stakeholders Ekosistem SDM Digital	Rp 317.462.000	Rp 308.036.074	97,03%
Rancangan Standar Kompetensi Kerja dan Peta Okupasi Bidang Kominfo	Rp 1.877.750.000	Rp 1.831.752.940	97,55%
Platform SDM Digital Nasional	Rp 4.554.590.000	Rp 4.547.283.607	99,84%
Digital Talent Scholarship	Rp 7.709.704.000	Rp 7.652.877.910	99,26%
TOTAL	RP 20.088.978.000	Rp 19.911.876.489	99,12%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran Puslitbang Aptika dan IKP tahun 2024 sebesar Rp 20.088.978.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu Rp 19.911.876.489 atau sebesar 99,12%. Realisasi anggaran di bawah 100% dikarenakan adanya efisiensi pada proses pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa.

Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi anggaran Puslitbang Aptika dan IKP mengalami penurunan sebesar 0,65%, dimana pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar 99,77% dan di tahun 2024 sebesar 99,12%.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Berikut perbandingan Realisasi Anggaran Puslitbang Aptika dan IKP Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Anggaran Puslitbang Aptika dan IKP Tahun 2023 dan 2024

Kegiatan	Pagu		Realisasi		%	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital	Rp 8.746.443.000	Rp 5.629.472.000	Rp 8.739.353.070	Rp 5.571.925.958	99,92%	99,98%
Koordinasi Stakeholders Ekosistem SDM Digital	Rp 906.642.000	Rp 317.462.000	Rp 906.571.862	Rp 308.036.074	99,99%	97,03%
Rancangan Standar Kompetensi Kerja dan Peta Okupasi Bidang Kominfo	Rp 3.581.877.000	Rp 1.877.750.000	Rp 3.581.873.980	Rp 1.831.752.940	99,99%	97,55%
Lembaga Sertifikasi Profesi bidang kominfo di Balitbang SDM	Rp 229.650.000	0 (tidak menjadi tulus Puslitbang Aptika dan IKP)	Rp 229.599.500	0 (tidak menjadi tulus Puslitbang Aptika dan IKP)	99,98%	0
Platform SDM Digital Nasional	Rp 5.534.198.000	Rp 4.554.590.000	Rp 5.491.853.439	Rp 4.547.283.607	99,23%	99,84%
Digital Talent Scholarship	Rp 7.273.403.000	Rp 7.709.704.000	Rp 7.263.871.055	Rp 7.652.877.910	99,49%	99,26%
TOTAL	RP 26.272.213.000	RP 20.088.978.000	Rp 26.213.122.906	Rp 19.911.876.489	99,77%	99,12%

Catatan :
 - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

BAB 4 PENUTUP

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik (Puslitbang Aptika dan IKP) telah melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Puslitbang Aptika dan IKP berhasil mencapai target kinerja dengan sangat baik, di mana 10 dari 10 indikator kinerja utama tercapai 100%. Indikator tersebut meliputi:

1. Jumlah Peta Okupasi dan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kominfo.
2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital.
3. Persentase (%) Pemrosesan Pengajuan Surat Rekomendasi Pendirian Calon LSP atau Re-Lisensi LSP.
Persentase Keberlangsungan Layanan Platform SDM Digital Nasional.
4. Persentase (%) Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang Dijadikan Referensi Program Pengembangan SDM Digital di Provinsi.
5. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Puslitbang Aptika dan IKP tahun 2024.
6. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Berjalan.
7. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Sebelumnya.
8. Persentase (%) Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa.
9. Persentase (%) Belanja Pengadaan Barang/Jasa yang Dilakukan Secara Elektronik (E-purchasing).

Dari sisi pengelolaan anggaran, Puslitbang Aptika dan IKP berhasil merealisasikan anggaran sebesar 99,12% dari DIPA revisi senilai Rp20.088.978.000. Sisa dana sebesar Rp177.101.511 (0,88%) tidak terserap karena adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**